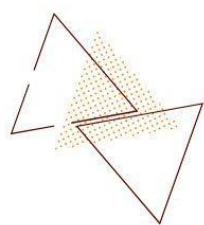
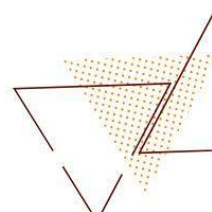


RENCANA KERJA

KECAMATAN PANCENG



2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan

perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Panceng merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Panceng maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.2.2 Tujuan

Renja Kecamatan Panceng tahun 2026 disusun berpedoman dari Renstra Kecamatan Panceng. Renja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini ditujukan untuk :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Panceng dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan.

2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.
4. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
5. Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Panceng Tahun 2026 dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
 22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, diformulasikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini berisi :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN : Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panceng ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Panceng dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Panceng serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki; dan
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2026; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Panceng menurut DPPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp. yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. dan anggaran belanja modal Rp. yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Sedangkan alokasi anggaran 2025 yang diterima Kecamatan Panceng menurut DPPA 2024 adalah sebesar Rp. 3.988.420.566,- yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.3.911.753.391,- dan anggaran belanja modal Rp. 76.667.175,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 5 (lima) program dan 29 (Dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panceng sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.1 (Tabel T-C.29), Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut :**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan {(Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Panceng s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 {Tahun berjalan (tahun n-1)}	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	36 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	62,86
7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	1dokume n	1dokume n	1dokume n	100%	1 dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	38,55
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	72 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	57,14
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang	22 orang	22 orang	22 orang	100%	25 orang	25 orang	66,67
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	57,14
7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	18 laporan	18 laporan	57,14
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	-
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	57,14
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	57,14
7	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	57,14

7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1paket	1paket	57,14
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	57,14
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	57,14
7	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1dokumen	66,67
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100,00
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	57,14
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	64,29
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	46,43
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 umit	12 unit	57,14
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	40,00
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	40,00
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	57,14
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,43
7	1	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	7 kegiatan	7 kegiatan	24,24
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 keg/5 dok	7 keg/5 dok	7 keg/5 dok	7 keg/5 dok	100%	5 dokumen	5 dokumen	30,30
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	100%	100%	100,00
7	1	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	28,57
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100,00
7	1	03	2.03	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	50,00
7	1	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	60,00
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	10 laporan	57,14
7	1	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100,00
7	1	04	7.04	01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	57,14
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	100%	100%	100,00
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	28 dokumen	28 dokumen	57,14

						Han Peraturan Kepala Desa								
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	12 dokumen	50,00
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	12 dokumen	57,14
7	1	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Dok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	12 dokumen	50,00

Dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panceng sampai dengan Tahun 2024 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), maka dapat dilihat hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.677.230,00,- dengan output 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun melalui hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Panceng / Forum SKPD.

Realisasi : Fisik 100 % dan keuangan 100 %

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp.2.492.185,00 dengan output 1(satu) dokumen RKA-SKPD dan KoordinRealisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD dengan Alokasi dana untuk sub ini Rp. 2.031.730,00,- dengan Output 1 dokumen Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp 2.492.185,00 dengan output 1 (satu) dokumen

Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD

Alokasi Dana untuk Sub ini Rp. 2.255.770,00 Dengan output 1 (satu) dokumen

Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.750.250,00-
dengan output 12 Laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini
Rp. 2.975.268.820,00 dengan output 22 Orang ASN
Kecamatan Panceng dibayarkan gaji dan tunjangan
selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 96,78%

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.364.415,00
dengan output 1 Laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 3.430.006,00
dengan output 6 dokumen Laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Lainnya

Alokasi Dana untuk Sub ini Rp 5.359.402,00 output 1
Paket. Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 70.914.782,00
dengan output 12 bulan. Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100 %

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 7.200.038,00
dengan output 1 Jenis. Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100 %

1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 18.194.460,00 dengan output 1 Jenis. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Pengadaan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 15.394.539,00 dengan output 2 Jenis Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 26.625.000,00 dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 72.482.175,00 dengan output 1 Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 235.296.000,00 dengan output 8 Tenaga THL 12 Kecamatan Panceng dibayarkan gaji selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 49.344.000,00 dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.4. Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau kendaraan dinas jabatan

Alokasi dana sub kegiatan ini Rp. 78.150.000,00 Dengan output 1 unit

Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

- 1.4.5. Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi dana sub kegiatan ini Rp 5.500.000,00 , -dengan output 6 unit

Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

- 1.4.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 4.945.000,00 dengan output 10 Unit Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

- 1.4.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 30.946.500,00,- dengan output 2 Unit Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp.127.220.388,00 dengan bentuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Output 6 dokumen

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 26.783.504,00 output 3 Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Pra Musrenbang Peserta 35 Orang
2. Musrenbang Peserta 116 Orang dan
3. Kegiatan e-planing 33 Orang Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

- 3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 3.2.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 44.617.907,00 dengan bentuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Output 1 Jenis.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

3.2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 40.791.760,00 dengan bentuk Kegiatan Sosilasaki Kebijakan Kependudukan Output 3 laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 72.764.256,00 output 12 laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 8.530.752,00 output 14 laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 8.856.752,00 output 28 dokumen

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5.1.2. Sub Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 12.816.000,-
output 14 laporan

Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

5.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 11.118.752,00
output 14 Desa

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5.1.4. Sub Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 9.034.752,00
output 14 Laporan Realisasi fisik 100% dan Keuangan
100%

5.1.5. Sub Fasilitasi Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Alokasi dana sub kegiatan ini Rp. 13.537.504,00 dengan
output 1 dokumen Realisasi fisik 100% dan Keuangan
100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD adalah proses evaluasi yang sistematis dan objektif untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam kinerja pelayanan Kecamatan Panceng sebagai berikut :

- a. Kualitas Pelayanan : Bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Panceng termasuk kecepatan, ketepatan dan keramahan
- b. Aksesibilitas : Bertujuan untuk menilai sejauh mana Kecamatan Panceng dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien termasuk kemudahan akses dan ketersediaan informasi
- c. Efisiensi : Bertujuan untuk menilai sejauh mana Kecamatan Panceng dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien termasuk penggunaan sumber daya dan waktu

- d. Efektivitas : menilai sejauh mana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Akuntabilitas ; Bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan Panceng dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dimana Kecamatan Panceng dalam melakukan analisis kinerja pelayanan dengan menggunakan metode Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Panceng.

Tabel 2.2 (T.C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panceng	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		84%	89%	90%	94%	92%	93%	88.11%	89.73	91%	91,5%	94 %	Ada perubahan target tahun 2026 yang semula 92 % menjadi 94% sudah sesuai PK APBD 2026

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Belum optimalnya sistem kualitas Pelayanan Publik ,kurangnya Kompetensi petugas pelayanan publik serta keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pelayanan publik
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang memadai
3. Adanya Refocusing Anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan terhambat

Untuk mengatasi isu-isu tersebut upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Panceng antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada petugas pelayan publik
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat prosedur pelayanan yang jelas,transparan dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada SOP.
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayan publik

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan publik serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sedangkan Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Berdasarkan isu – isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Kecamatan Panceng serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029.
2. Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator program dan kegiatan dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
3. Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panceng
4. Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immateriil.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Panceng telah ditetapkan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 3.1 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 5.4 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- 2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 1.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Panceng dapat dilihat pada Tabel 2.3 (Tabel. T-C.31) berikut ini :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Panceng	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	4.131.812.301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Panceng	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	4.131.812.301	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 dokumen	34.312.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	34.312.600	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	3.521.423.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.521.423.744	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	186.551.797	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	186.551.797	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	12 bulan	289.890.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	289.890.000	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	99.634.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	99.634.160	
6.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan Urusan pemerintahan dTingkat Kecamatan	7 kegiatan	100.072.850	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan Urusan pemerintahan dTingkat Kecamatan	100%	100.072.850	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	101.070.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	101.070.800	
7.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	14 desa	26.122.800	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	26.122.800	
8.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	14 desa	74.948.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	74.948.000	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase fasilitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	61.634.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase fasilitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	61.634.800	
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	55.018.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	55.018.400	
10.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	6.616.400	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	6.616.400	

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	37.822.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	37.822.400	
11.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14 desa	37.822.400	Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	37.822.400	
JUMLAH					4.432.413.151					4.432.413.151	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat telah ditetapkan melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029.

Ketetapan tersebut sebagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Panceng dan bersifat pengkoordinasian sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, karena pelaksanaannya sudah ditangani oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana yang terinci dalam ***lampiran Tabel 2.4 (Tabel. T-C.32) berikut ini : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026***

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	besaran/volume	Catatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Panceng	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	6 dokumen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Renja OPD	1 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panceng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	25 orang	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 laporan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18 laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	1 paket	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	
13	Penyediaan Bahan Logistik	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan bahan logistik	1 paket	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panceng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Panceng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 Dokumen	

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 laporan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 unit	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	1 unit	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	1 unit	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	1 unit	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	
1	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	7 kegiatan	
23	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	7 kegiatan	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	14 desa	
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Kec. Panceng	Jumlah lembaga kemasuarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	14 desa	

2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	14 Desa	
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Panceng	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	14 Desa	
26	Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kec. Panceng	Jumlah laporan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	3 laporan	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	12 bulan	
27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	
2	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Panceng	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	
28	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	
29	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Panceng	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	28 dokumen	
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	14 dokumen	
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	14 dokumen	
32	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kec. Panceng	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	14 dokumen	

33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan didesa	14 dokumen	
----	--	--------------	--	------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Dengan memperhatikan beberapa hal diatas, maka Kecamatan Panceng siap melaksanakan dan mensukseskan Visi Bupati Gresik yang ditetapkan yakni :

“ Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam rangka mewujudkan visinya yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan meliputi :

- 1) Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
- 2) Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 3) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru Yakni **Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)** Kecamatan Panceng pada tahun Tahun 2025 - 2029 akan mensukseskannya melalui Program prioritas yang selaras dengan Nawa Karsa tersebut yakni:

- 1) Gresik Integrated Smart System

Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik

dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)

2) Gresik Rembug Akur

Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju

3) Desa Siap

Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa

4) Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan

Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah analisis mendalam tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada tingkat Kecamatan. Dengan melakukan telaahan kebijakan Nasional kecamatan Panceng menyusun rencana kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam dokumen rencana kerja Kecamatan panceng telaahan kebijakan nasional yang mencakup beberapa aspek penting antara lain :

1. Pelayanan Publik

Yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pengelolaan administrasi kependudukan dan perizinan.

2. Pembangunan Ekonomi Lokal

Yaitu dengan pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan pembangunan pariwisata, pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas infrastruktur

3. Kesejahteraan masyarakat

Yaitu dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum

4. Pemerintahan yang baik

Yaitu dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Kecamatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai wujud sinkronisasi dan penjabaran Rencana pembangunan Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra adalah : “ ***Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik*** “,

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus terhadap penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Yaitu : “ ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*** “

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Latar Belakang

Latar Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah belum optimalnya aparat birokrat, ketidaksesuaian keahlian/bidang sebagai petugas pelayanan publik yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap aturan kedisiplinan serta profesionalisme yang rendah sehingga belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*.

B. Tujuan Program

Tujuan program meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam melaksanakan TUPOKSI sebagai Aparatur Pemerintahan

C. Sasaran Program

Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Pemenuhan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Umum
- Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air,dan listrik
- Tercapainya perawatan barang milik daerah
- Tercapainya tertib administrasi keuangan
- Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN
- Pemenuhan alat tulis kantor
- Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
- Pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
- Pemenuhan Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang didanai dengan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ada

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

E. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

- Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Persentase administrasi keuangan perangkat daerah
- Persentase administrasi umum perangkat daerah
- Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kerja baik kualitas maupun kuantitas dan belum maksimalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B. Tujuan Program

Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik adalah Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah tersedianya sarana prasarana Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik yang memadai/memenuhi syarat

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Persentase Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut:

3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Latar Belakang

Latar belakang program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian diri masyarakat secara mandiri serta menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Desa dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta masyarakat ikut serta dan berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan. sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Lembaga Masyarakat Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah :

- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Presentasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.3.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Latar Belakang

Latar belakang program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar untuk mewujudkan masyarakat yang aman , tertib dan tentram serta perlindungan hak dan kewajiban semua masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Panceng

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah terwujudnya lingkungan unit kerja dan lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- Presentasi Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.3.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Latar Belakang

Latar Belakang program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan desa sebagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

B. Tujuan Program

Tujuan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /RT/RW.”

C. Sasaran Program

Sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terciptanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Presentasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Presentasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Presentasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

Tabel 2.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 (RANKIR Th.2026)
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN PANCENG				4.316.630.134,14				4.748.293.147,55
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Kec. Panceng	100%	3.886.211.334,14	Pajak Daerah		100%	4.274.832.467,55
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Panceng	6 dokumen	12.000.000,00	Pajak Daerah		6 dokumen	13.200.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	Kec. Panceng	1 dokumen	2.000.000,00	Pajak Daerah		1 dokumen	2.200.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	2.000.000,00	Pajak Daerah		1 dokumen	2.200.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	2.000.000,00	Pajak Daerah		1 dokumen	2.200.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	2.000.000,00	Pajak Daerah		1 dokumen	2.200.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	2.000.000,00	Pajak Daerah		1 dokumen	2.200.000,00
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	Kec. Panceng	1 Laporan	2.000.000,00	Pajak Daerah		1 Laporan	2.200.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	3.357.800.380,15	Pajak Daerah		12 bulan	3.693.580.418,17
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Panceng	25 orang	3.353.800.380,15	DAU&Pajak Daerah		25 orang	3.689.180.418,17
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Panceng	1 laporan	2.000.000,00	Pajak Daerah		5 laporan	2.200.000,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Kec. Panceng	18 laporan	2.000.000,00	Pajak Daerah		18 laporan	2.200.000,00

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025			Lokasi Kegiatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	
				Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2025
1	2	3		4		5	5	6	7
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	79.840.953,99	Pajak Daerah		12 bulan	87.825.049,39
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	Kec. Panceng	1 paket	4.850.900,00	Pajak Daerah		1 paket	5.335.990,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Panceng	1 paket	22.161.200,00	Pajak Daerah		1 paket	24.377.320,00
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Panceng	1 paket	4.461.900,00	Pajak Daerah		1 paket	4.908.090,00
13	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik	Kec. Panceng	1 paket	13.535.000,00	Pajak Daerah		1 paket	14.888.500,00
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Panceng	1 paket	6.075.653,99	Pajak Daerah		1 paket	6.683.219,39
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Panceng	1 laporan	5.000.000,00	Pajak Daerah		1 laporan	5.500.000,00
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Panceng	1 Dokumen	23.756.300,00	Pajak Daerah		1 Dokumen	26.131.930,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	364.146.000	Pajak Daerah		12 bulan	400.560.600,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	Kec. Panceng	12 laporan	48.594.000,00	Pajak Daerah		12 laporan	53.453.400,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	Kec. Panceng	12 laporan	315.552.000,00	Pajak Daerah		12 laporan	347.107.200,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Panceng	12 bulan	72.424.000,00	Pajak Daerah		12 bulan	79.666.400,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kec. Panceng	12 unit	36.940.000,00	Pajak Daerah		12 unit	40.634.000,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	Kec. Panceng	1 unit	5.500.000,00	Pajak Daerah		1 unit	6.050.000,00
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Kec. Panceng	1 unit	10.904.000,00	Pajak Daerah		1 unit	11.994.400,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Kec. Panceng	1 unit	19.080.000,00	Pajak Daerah		1 unit	20.988.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Kec. Panceng	100%	114.157.700,00	Pajak Daerah		100%	125.573.470,00
6	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kec. Panceng	7 kegiatan	114.157.700,00	Pajak Daerah		7 kegiatan	125.573.470,00
23	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Kec. Panceng	7keg/ 5 dok	114.157.700,00	Pajak Daerah		7 kegiatan	125.573.470,00

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100%	145.202.500,00	Pajak Daerah		100%	159.722.750,00
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Panceng	14 desa	41.759.200,00	Pajak Daerah		14 desa	45.935.120,00
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang desa	Kec. Panceng	14 desa	41.759.200,00	Pajak Daerah		14 desa	45.935.120,00
8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kec. Panceng	14 Desa	103.443.300,00	Pajak Daerah		14 desa	113.787.630,00
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec. Panceng	14 Desa	44.968.900,00	Pajak Daerah		14 desa	49.465.790,00
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat	Kec. Panceng	3 laporan	58.474.400,00	Pajak Daerah		3 laporan	64.321.840,00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Kec. Panceng	100%	88.838.000,00	Pajak Daerah		100%	97.721.800,00
9	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	Kec. Panceng	12 bulan	66.334.400,00	Pajak Daerah		12 bulan	72.967.840,00
27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Panceng	12 bulan	66.334.400,00	Pajak Daerah		12 bulan	72.967.840,00
10	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	Kec. Panceng	14 Desa	22.503.600,00	Pajak Daerah		14 Desa	24.753.960,00
28	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	Kec. Panceng	14 Desa	22.503.600,00	Pajak Daerah		14 Desa	24.753.960,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kec. Panceng	100%	82.220.600,00	Pajak Daerah		100%	90.442.660,00
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	14 Desa	82.220.600,00	Pajak Daerah		14 Desa	90.442.660,00
29	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	Kec. Panceng	28 dokumen	20.625.600,00	Pajak Daerah		28 dokumen	22.688.160,00

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	14 dokumen	14.894.600,00	Pajak Daerah		14 dokumen	16.384.060,00
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kec. Panceng	14 dokumen	21.283.200,00	Pajak Daerah		14 dokumen	23.411.520,00
32	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	Kec. Panceng	0	-	Pajak Daerah		0	0,00
33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan didesa	Kec. Panceng	2 dokumen	25.417.200,00	Pajak Daerah		2 dokumen	27.958.920,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Rencana kerja Kecamatan Panceng pada tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra PD). Rencana kerja ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja Kecamatan Panceng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Panceng menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang berfokus pada **peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.**

Seluruh kegiatan tahun berjalan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, serta sejalan dengan tujuan pembangunan wilayah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 menjadi kelanjutan dari hasil pelaksanaan tahun sebelumnya, dengan penekanan pada peningkatan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan partisipasi publik.

Tabel 4.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Panceng Kab. Gresik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG							4,432,413,151						4,875,654,466	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													-	
	7.01	KECAMATAN													-	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian sasaran OPD	100%			100%	4,131,812,301	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				100%	4,544,993,531	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	34,312,600	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P1 - Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbanngan Smart Governance berbasis satu data pembangunan			6 dokumen	37.743,860	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	8,980,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P1 - Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbanngan Smart Governance berbasis satu data pembangunan			1 Dokumen	9,878,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,896,600	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	1 Dokumen	4,286,260	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,645,200	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi		1 Dokumen	2,909,720	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,721,600	Kab. Gresik, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		P1 - Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung p engembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan		1 Dokumen	7,393,760	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,790,000	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		P1 - Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		1 Dokumen	3,069,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,279,200	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	ANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		P1 - Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung p engembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan		1 Laporan	10,207,120	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3,521,423,744	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 bulan	3,873,566,118	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	5 Orang/bulan	3,508,767,044	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		5 Orang/bulan	3,859,643,748	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,707,200	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Laporan	10,677,920	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	2,949,500	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		18 Laporan	3,244,450	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	186,551,797	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 bulan	13,090,660	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11,900,600	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Paket	13,090,660	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,836,200	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Paket	55,919,820	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4,507,500	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Paket	4,958,250	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	33,020,000	Kab. Gresik, Puncung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Paket	36,322,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14,087,497	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Paket	15,496,247	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28,100,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Laporan	30,910,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44,100,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Dokumen	48,510,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	289,890,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 bulan	318,879,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah fasilitasi pembayaran listrik,air dan telepon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48,594,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 Laporan	53,453,400	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	241,296,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 Laporan	265,425,600	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,634,160	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 bulan	109,597,576	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	37,250,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		12 Unit	40,975,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7,500,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Unit	8,250,000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	26,886,000	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Unit	29,574,600	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	27,998,160	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-		1 Unit	30,797,976	KECAMATAN PANCENG
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100,072,850	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				100%	110,080,135	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7 Kegiatan	100,072,850.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhnikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	7 Kegiatan	110,080,135	KECAMATAN PANCENG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 kegiatan	100,072,850	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	7 kegiatan	110,080,135	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	80 Persen 100 Persen 85 Persen	80 Persen 100 Persen 85 Persen	100%	101,070,800						95 % 100 % 100 %	111,177,880	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	26,122,800			Memperkuat Stabilitas Polhukhnikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 Desa	28,735,080	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 desa	26,122,800	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 desa	28,735,080	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14 desa	74,948,000			Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 desa	82,442,800	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina				14 desa	48,330,400	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 desa	53,163,440	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	26,617,600	Kab. Gresik, Panceng, Doudo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	3 Laporan	29,279,360	KECAMATAN PANCENG
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100 Persen			100 Persen	61,634,800						100 Persen	67,798,280	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	55,018,400	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	12 Bulan	60,520,240	KECAMATAN PANCENG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	55,018,400	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	12 bulan	60,520,240	KECAMATAN PANCENG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	6,616,400			Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 Desa	7,278,040	KECAMATAN PANCENG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 desa	6,616,400	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 desa	7,278,040	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	37,822,400						100 Persen	41,604,640	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	37,822,400			Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	12 Bulan	41,604,640	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	4,638,400	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nika m Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	28 Dokumen	5,102,240	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	6,907,400	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	esa-desa se Kecamatan Panceng	14 Dokumen	7,598,140	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	8,677,400	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 Dokumen	9,545,140	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				14 Dokumen	6,746,400	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	14 Dokumen	7,421,040	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,852,800,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transformasi Pelayanan Publik	PS - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa se Kecamatan Panceng	1 Dokumen	11,938,080	KECAMATAN PANCENG
	J U M L A H							4,432,413,151,00								5,347,878,939

BAB V

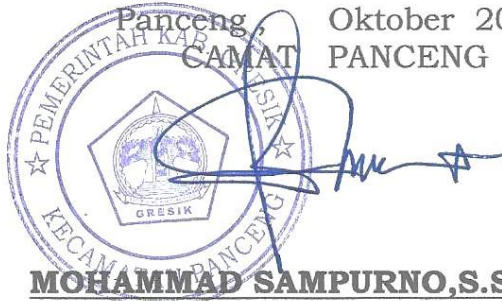
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2025- 2029 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Panceng Tahun 2026.
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2026

6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Panceng Tahun 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahun 2026 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.

Panceng, Oktober 2025
CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19681129 199302 1 001